

GOYOBOD

NEWS

Edisi II Tahun 2019

Warung Goyobod

Chef : Teguh Priyantono

Checker : Dwi Hendianto

Cook : Arlinda M. Sholikhah, Maman N. Rukmana, Mushawir Ghani, Lia Yuliansyah, Khristine Hakim, Vinny Ruliyani



TABLE OF CONTENTS

HEADLINES

1. Pengarahan Tortama KN V, Kajian Muslim, dan Buka Puasa Bersama di Perwakilan Provinsi Jawa Barat
2. Rangkaian Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas LKPD TA 2018
3. Media Workshop: NgoPI Bareng BPK Jabar 2019

FEATURE

1. Halal Bihalal BPK Perwakilan Provinsi Jabar
2. Peningkatan Pengelolaan Data TLHP melalui Sosialisasi dan Pelatihan SIPTL di Perwakilan Provinsi Jawa Barat
3. Perayaan Idul Adha 1440 H di Perwakilan Jawa Barat
4. FGD Disinkronisasi Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah yang Bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang Lebih Tinggi



Pengarahan Tortama KN V, Kajian Muslim, dan Buka Puasa Bersama di Perwakilan Provinsi Jawa Barat

Bandung (27/05), Sebagai rangkaian acara di penghujung ramadhan 1440 Hijriyah, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat melaksanakan kegiatan Pengarahan Tortama KN V, Kajian Muslim, dan Buka Puasa Bersama. Acara yang dilakukan se usai penyerahan LHP BPK atas LKPD TA 2018 tersebut dimulai dengan Pengarahan Tortama KN V, Bambang Pamungkas, yang kemudian dilanjutkan dengan Kajian Muslim yang disampaikan oleh Ustadz Dedi Muttaqin. Dalam kesempatan tersebut, Tortama KN V maupun Ust. Dedi Muttaqin mengingatkan seluruh pegawai untuk menjaga nama baik dan perilaku karena segala sesuatunya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan YME kelak.



Selepas adzan magrib, seluruh pegawai melanjutkan rangkaian acara shalat maghrib berjamaah dan buka puasa bersama. Acara ini diharapkan dapat me-refresh kembali energi selepas menjalankan pemeriksaan LKPD dan penyusunan LHP atas LKPD, sekaligus memepererat silaturahmi keluarga besar BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat sebelum libur panjang dalam rangka Hari Raya Idul Fitri 1440 H.



Rangkaian Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas LKPD TA 2018

Bandung (28/5), BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat memulai rangkaian Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran (TA) 2018. Rangkaian acara tersebut dimulai pada Senin, 27 Mei 2018 bertempat di Auditorium Lt.5 BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat. Pada kesempatan tersebut, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat menyerahkan 14 LHP kepada 14 entitas pemeriksaan, yaitu Pemerintah Kabupaten Ciamis, Pemerintah Kabupaten Cirebon, Pemerintah Kabupaten Garut, Pemerintah Kabupaten Kuningan, Pemerintah Kabupaten Majalengka, Pemerintah Kabupaten Pangandaran, Pemerintah Kabupaten Purwakarta, Pemerintah Kabupaten Subang,



Pemerintah Kabupaten Sumedang, Pemerintah Kota Bandung, Pemerintah Kota Banjar, Pemerintah Kota Bogor, Pemerintah Kota Cirebon, dan Pemerintah Kota Sukabumi. LHP diserahkan oleh Auditor Utama Keuangan Negara V BPK RI, Bambang Pamungkas, dengan disaksikan oleh Kepala Perwakilan, Arman Syifa. LHP diserahkan kepada kepada Ketua atau Wakil Ketua DPRD dan Pimpinan Daerah atau yang mewakili pada masing-masing entitas pemeriksaan. Keempatbelas entitas pemeriksaan tersebut memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Usai melakukan penyerahan LHP LKPD Provinsi Jawa Barat TA 2018, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat menutup rangkaian acara dengan melakukan penyerahan LHP LKPD TA 2018 kepada 13 pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat. Ketigabelas entitas yang akan menerima LHP BPK tersebut adalah Pemerintah Kota Tasikmalaya, Pemerintah Kota Depok, Pemerintah Kota Cimahi, Pemerintah Kota Bekasi, Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya, Pemerintah Kabupaten Sukabumi, Pemerintah Kabupaten Karawang, Pemerintah Kabupaten Indramayu, Pemerintah Kabupaten Cianjur, Pemerintah Kabupaten Bogor, Pemerintah Kabupaten Bekasi, Pemerintah Kabupaten Bandung Barat, dan Pemerintah Kabupaten Bandung. Pada kesempatan tersebut, LHP BPK diserahkan langsung oleh Kepala Perwakilan, Arman Syifa, di Auditorium Lt.5 Kantor BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat kepada Ketua atau Wakil Ketua DPRD dan Pimpinan Daerah atau yang mewakili pada masing-masing entitas pemeriksaan. Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan BPK atas LKPD TA 2018, termasuk implementasi atas rencana aksi yang telah dilaksanakan, maka BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kepada 10 Pemerintah Daerah, yaitu Pemerintah Kota Depok, Pemerintah Kota Cimahi, Pemerintah Kabupaten Bekasi, Pemerintah Kabupaten Sukabumi, Pemerintah Kabupaten Bogor, Pemerintah Kabupaten Indramayu, Pemerintah Kabupaten Karawang, Pemerintah Kabupaten Bandung, Pemerintah Kota Bekasi, dan Pemerintah Kota Tasikmalaya. Sedangkan atas LKPD TA 2018 pada Pemerintah Kabupaten Cianjur, Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya, dan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat, BPK memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dikarenakan hasil pemeriksaan BPK menunjukkan adanya permasalahan material yang mengganggu kewajaran laporan keuangan.





Media Workshop: NgoPI Bareng BPK Jabar 2019

Bandung (30/08), BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat menggelar kegiatan “NgoPI Bareng BPK Jabar 2019” pada Jumat, 30 Agustus 2019. Acara yang berlangsung di Auditorium Lt. 5 Kantor BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat ini merupakan kegiatan rutin yang biasa dilakukan dalam rangka meningkatkan hubungan dan kinerja positif dengan media, atau yang biasa dikenal dengan *Media Workshop*.

“NgoPI Bareng BPK Jabar 2019” ini bukan hanya sekedar berkumpul untuk menikmati sajian kopi bersama-sama. NgoPI disini juga merupakan singkatan dari “Ngobrol Penuh Informasi”, yang diharapkan melalui acara yang dikemas secara santai ini dapat meningkatkan pemahaman satu sama lain tentang tugas dan peran masing-masing sehingga dapat mewujudkan sinergi positif dalam kehidupan bernegara.

Hal lain yang berbeda dari tahun – tahun sebelumnya, acara yang dibuka oleh Kepala Sekretariat Perwakilan, Teguh Priyantono, ini tidak hanya dihadiri oleh media/pers dan humas pemerintah daerah, namun dihadiri juga oleh inspektorat masing-masing pemerintah daerah di wilayah Provinsi Jawa Barat. Hadir sebagai narasumber adalah Kepala Perwakilan Provinsi Jawa Barat – Arman Syifa dan Kepala Subauditorat Jabar I – Ari Endarto.

Dengan menghadirkan pihak inspektorat dari masing-masing pemerintah daerah, diharapkan kegiatan *media workshop* tahun ini dapat menampung lebih banyak masukan dalam peningkatan kualitas dan kapasitas BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat dalam menjalankan tugas dan perannya untuk mewujudkan tata kelola keuangan negara yang akuntabel. BPK yang bersifat terbuka menunjukkan BPK sebagai lembaga yang mandiri, transparan, dan tidak arogan meski tugas utamanya adalah melaksanakan tugas pemeriksaan atas keuangan negara.

Acara yang berlangsung interaktif ini diisi oleh berbagai pertanyaan dan masukan positif, baik dari media cetak dan elektronik, maupun dari humas dan inspektorat pemerintah daerah. Acara yang ditutup dengan foto bersama ini dan ramah-tamah.



Halal Bihalal BPK Perwakilan Provinsi Jabar



Bandung (18/6), Selepas libur Idul Fitri 1440 H, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat menyelenggarakan halal bihalal di lingkungan Perwakilan Provinsi Jabar. Bertempat di Auditorium It.5 Kantor Perwakilan, acara dihadiri oleh seluruh pegawai BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat. Acara dibuka langsung oleh Kepala Perwakilan, Arman Syifa dan dilanjutkan dengan ceramah dari Ust. Achmad Humaidi, atau biasa dipanggil Ahum.

Selepas ceramah yang berlangsung interaktif, acara dilanjutkan dengan pisah sambut kepada para pegawai yang akan pindah bertugas di Kantor Pusat atau Perwakilan lain dan juga bagi pegawai yang baru datang pindah ke Perwakilan Jabar. Usai pisah sambut, seluruh pegawai saling bersalaman dan bermaaf-maafan sebagai tradisi dalam perayaan Hari Idul Fitri.

Usai bersalam-salaman, seluruh pegawai menikmati sajian opor dan ketupat bersama.



Peningkatan Pengelolaan Data TLHP melalui Sosialisasi dan Pelatihan SIPTL di Perwakilan Provinsi Jawa Barat



Bandung (18/07), Bertempat di Auditorium Lt.5 berlangsung kegiatan Sosialisasi dan Pelatihan Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Pemantauan Tindak Lanjut (SIPTL). Sosialisasi dan pelatihan tersebut merupakan salah satu kegiatan yang dilaksanakan oleh BPK dalam upaya melaksanakan amanat Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2017, dalam hal pemanfaatan Aplikasi SIPTL untuk mengelola data pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan secara *real time* antara BPK dengan entitas yang diperiksa. Aplikasi SIPTL memungkinkan semua pihak dapat memantau perkembangan tindak lanjut hasil pemeriksaan karena semua sudah berbasis web.

Acara dibuka oleh Kepala Perwakilan, Arman Syifa, dan diikuti oleh Inspektorat di Provinsi/Kabupaten/Kota di wilayah Jawa Barat dan juga diikuti para pemeriksa di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat. Sosialisasi dan pelatihan tersebut dilaksanakan selama dua hari, tanggal 17 s.d. 18 Juli 2019. Hadir sebagai narasumber sosialisasi dan pelatihan adalah Kasubdirektorat EPP Kinerja, Sulung Setyo Amboro dari Direktorat Utama Perencanaan, Evaluasi, dan Pengembangan (EPP), serta Kasubbag Pengembangan Sistem Informasi Kelembagaan, Desi Alex Lestari dari Biro Teknologi Informasi (TI).

Melalui acara ini, diharapkan penggunaan SIPTL dapat lebih ditingkatkan lagi sehingga lebih bermanfaat bagi BPK maupun pihak Pemda. Selain itu, acara ini juga dimaksudkan untuk memperbarui data para inputer, terkait tugas pembaruan data SIPTL di masing-masing entitas, sehingga pengelolaan data pemantauan tindak lanjut dapat lebih maksimal.



Perayaan Idul Adha 1440 H di Perwakilan Jawa Barat



Bandung (12/08), Dalam rangka merayakan Hari Raya Idul Adha 1440 H, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat menggelar kegiatan potong kurban dan makan bersama. Pemotongan hewan kurban sebanyak 2 ekor sapi dan 3 ekor kambing dilakukan langsung oleh para pegawai BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat. Hewan kurban tersebut merupakan hewan kurban dari para pegawai di lingkungan BPK Provinsi Jawa Barat.

Pemotongan Kurban



Pembagian hewan kurban dilakukan oleh panitia kurban yang merupakan para pegawai BPK Provinsi Jawa Barat. Distribusi dilakukan kepada masyarakat yang kurang mampu di lingkungan kantor Perwakilan. Usai pemotongan yang berlangsung di halaman belakang Gedung BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat, sebagian hasil potong yang merupakan bagian yang berhak diperoleh pekurban dimasak bersama-sama oleh para pegawai wanita. Selepas matang, para pegawai menikmati santapan bersama-sama, yang terdiri dari tongseng, gulai, dan sate, serta ditutup oleh rujak coel khas Jawa Barat.

Melalui kegiatan pemotongan hewan kurban yang rutin dilaksanakan setiap Idul Adha di Perwakilan Provinsi Jawa Barat ini, diharapkan dapat meningkatkan kebersamaan antar pegawai, sekaligus kepekaan dan kerukunan dengan warga setempat.





FGD DISINKRONISASI PERATURAN DAERAH/PERATURAN KEPALA DAERAH YANG BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG LEBIH TINGGI

Bandung (15/08), Ditama Binbangkum menggelar acara *Focus Group Discussion (FGD)* bertema “Disinkronisasi Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah yang Bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang Lebih Tinggi” di BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat. Acara yang digelar di Bandung tersebut juga diikuti oleh pemeriksa dan staf Subbagian Hukum dari BPK Perwakilan lainnya, diantaranya BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta, Gorontalo, Riau, Papua, dan Sulawesi Utara.

Acara dibuka oleh Plt. Kaditama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara, Dr. Blucer W. Rajagukguk, S.H., M.Sc., CA., CFE., dengan didampingi Kepala Perwakilan Provinsi Jawa Barat, Arman Syifa, S.ST., M.Acc., Ak., Ak. Hadir pula dalam rangkaian acara ini, Kepala Direktorat Konsultasi Hukum dan Kepaniteraan Kerugian Negara/Daerah – Akhmad Anang Hernady, S.H.

Acara yang bertempat di Auditorium BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat ini berlangsung selama 2 hari ini, yaitu 14 – 15 Agustus 2019. Bertindak sebagai narasumber adalah Adrian E. Rompia, S.H., M.H. selaku Akademisi Hukum Administrasi Negara UNPAD dan Widati Wulandari, S.H., M.Crim. selaku Akademisi Hukum Pidana UNPAD. Kedua narasumber tersebut mengupas tentang Perda/Peraturan Kepala Daerah yang bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, kekuatan hukumnya, langkah sinkronisasinya, serta tindak pidana dalam penerbitan peraturan perundang-undangannya. Acara yang berlangsung 2 hari tersebut berlangsung interaktif, baik melalui tanya jawab maupun diskusi bersama para narasumber yang berasal dari Ditama Binbangkum maupun Akademisi.

